RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN TANJUNGANOM

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Tanjunganom, 2018

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT TANJUNGANOM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

MOHAMAD MAKRUP, S.Sos
Pembina
NIP. 19690115 1990031008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGANOM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGANOM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjunganom (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, sosial budaya dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator,

serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Tanjunganom Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :

    a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal ;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
r. Pearturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

s. Praturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahu 2010 – 2030;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

u. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganom ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tanjunganom guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganomini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGANOM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS KECAMATAN TANJUNGANOM

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGANOM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjunganom

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Tanjunganom.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjukyaitumenyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

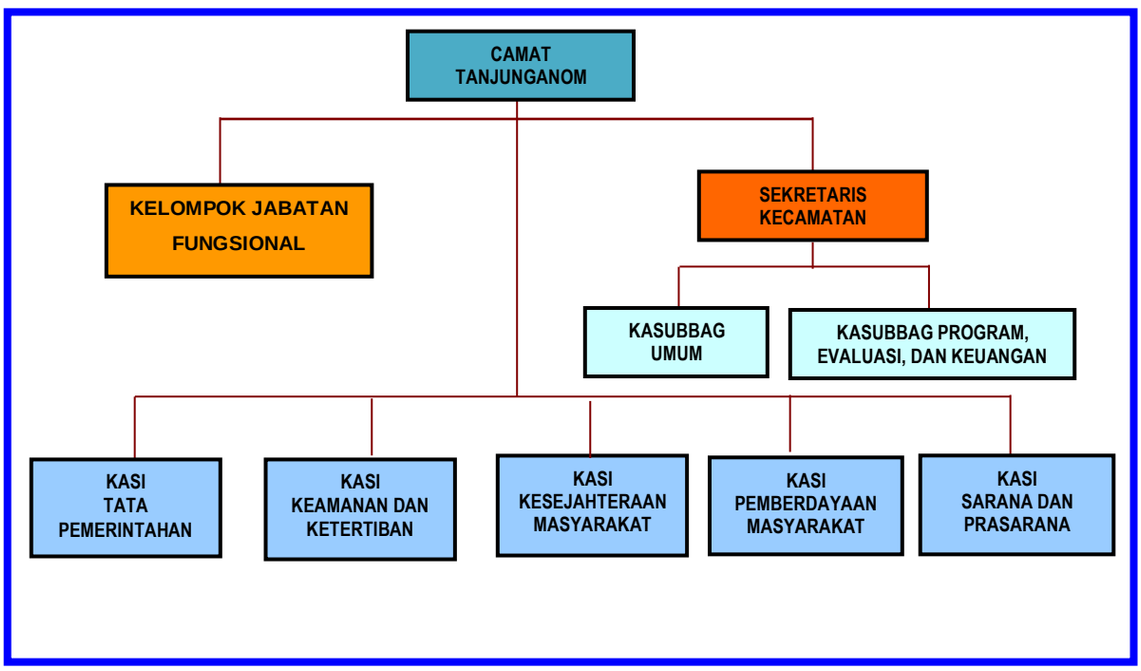
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. StrukturOrganisasi

Kecamatan TanjunganomKabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan TanjunganomKabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;
c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
h. pembuatan laporan penyelengaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
c. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

d. pembuatan laporan pelaksanaan pembinan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
c. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
d. Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
e. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
f. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
g. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengankegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

a. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalm forum musyawarah perencanaan pembanguan di desa/kelurahan dan kecamatan

b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

a. Pengoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
d. Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
e. Pembuatan laporan penyelenggaran kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanjunganom

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Tanjunganom adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 9 (sembilan), yang terisi sebanyak 9 (sembilan) jabatan struktural dan dibantu oleh 12 (dua belas) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjunganom

Berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	9
6.	Sekdes PNS	8
7.	THL	3
8.	Lurah/KaKel	2
9.	Sekkel	2
10.	Kasi Kel.	5
11.	Staf Kel	6
12.	THL Kel	8
Jumlah		**27**

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Tanjunganomsebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom dan 2 Kelurahan

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	3
2.	Penata Tingkat I	III/d	9
3.	Penata	III/c	2
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	6
5.	Pengatur Tk. I	II/d	2
6.	Pengatur	II/c	16
7.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
8.	Pengatur Muda	II/a	1
9.	Juru	I/c	1
Jumlah			**41**

Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Tanjunganom dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom dan Kelurahan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	12
3.	D3	2
4.	SMA	22
5.	SMP	3
6.	SD	1
JUMLAH		**41**

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor 1 (satu) bidang;
2. Gedung Pendopo Pertemuan 1
3. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Rumah Dinas 1 unit
5. Gedung PKK 1 Unit
6. Gardu Pos Jaga Sat Pol PP.
7. Musholla
8. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat1 (satu) buah yaitu 1 unit Isuzu Panther Tahun 2013
   - Roda dua (dua)Unit yaitu Honda Supra Tahun 2006 dan Yamaha Vixon 2016

9. Peralatan inventaris lainnya kantor Kecamatan dan Kelurahan dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 20 buah
- Meja layanan : 3 buah
- Kursi : 40 buah
- Bangku Panjang : 4 buah
- Kursi stainlist : 35 buah
- Kursi plastik : 50 buah
- Meja kursi tamu : 2 unit
- Sound sistem : 1 set
- Televisi : 1 unit
- Komputer khusus KTP SIAK : 1 unit
- Komputer e-KTP : 2 unit (depdagri)
- Laptop : 4 unit
- Printer : 7 unit
- Telepon/fax : 1 unit
- Genset listrik : 1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanjunganom dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**	**974**	**1057**	**1079**	**1179**	**1280**	**97,4%**	**97,8%**	**98,09%**	**98,17%**	**98,33%**
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				88	98	168	177	186	88	98	186	177	183	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator "*Jumlah Pelayanan Umum",* realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan "*excellent service*" (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator "Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi", pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.479.000	68.291.200	70.429.000	70.429.000	81.929.000	76.314.485	66.586.035	68.446.322	68.446.322	76.047.334	96,02	97,50	97,18	697,18	92,82	15,52	19,23
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	194.521.000	96.963.800	66.836.000	66.836.000	71.136.000	194.344.000	91.825.800	66.836.000	66.836.000	71.136.000	99,91	94,70	100	100	100	18,79	19,78
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.260.000	100	100	100	100	36	8,57	17,44
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	94.000.000	219.018.400	305.521.800	305.821.800	232.218.400	94.000.000	217.520.400	303.910.800	305.821.800	217.818.900	100	99,32	99,47	99,47	93,80	26,34	19,68
5	Peningkatan Kinerja Kelurahan	-	-	-	-	1.048.003.200	-	-	-	-	1.035.403.403	-	-	-	-	98,80	-	-

Sumber : LRA Kecamatan TANJUNGANOM 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom

2.4.1. Tantangan

a. Kecamatan Tanjunganom lebih dominan sebagai wilayah pertanian juga dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya perdagangan yang makin pesat,arus lalu lintas semakin padat dan pengaruh dari luar daerah dapat masuk dengan cepat yang membawa dampak baik positif maupun negatif di masyarakat KecamatanTanjunganom.
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah sehingga menuntut perencanaan akan pembangunan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tanjunganomharus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
f. Masih perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah;
g. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
h. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Tanjunganom.

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Tanjunganom dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tanjunganomuntuk memacu dan

memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

c. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tanjunganomdalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tanjunganom;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tanjunganom, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tanjunganom;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjunganom. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjunganom. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.
j. Pembangunan infrastruktur jembatan sebagai penghubung antar kabupaten yang dapat memacu roda perekonomian masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjunganom.

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjunganommenggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Tanjunganom;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Tanjunganom yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pegawai/aparatur di OPD Kecamatan Tanjunganomyang belum memadai, terutama sebagai staf pelaksana yang jumlahnya masih sangat kurang ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Banyaknyausulan perencanaan pembangunan lewat musrenbang sehingga membutuhkan anggaran biaya yang besar, menyebabkan beberapa perencanaan program kegiatan pembangunan tidak terlaksana pada waktu yang telah direncanakan;
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tanjunganom;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdaya an masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus

pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Tanjunganom sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Tanjunganom dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di **misi ke-2 (dua**). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Tanjunganom memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanjunganom, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan RenstraKementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Disamping menelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanjunganom harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Tanjunganomtermasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Tanjunganom sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Tanjunganom termasuk jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Tanjunganom sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Baron dan merupakan jalan penghubung dengan jalan provinsi di Kabupaten Kediri melalui Warujayeng – Kediri.
c. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Tanjunganom dilalui oleh aliran sungai Brantas melalui bendung gerak yang ada disebelah selatan Kecamatan Prambon dan sungai ini melintasi wilayah Kecamatan Tanjunganom yang berakibat juga rawan banjir
d. Kawasan peruntukan pertanian khususnya hortikultura (Pasal 28). Salah satu adalah sentra pembibitan yang berada di Desa Kedungrejo dan Warujayeng dan Sonobekel.
e. Kawasan peruntukan perindustrian kecil dan menengah, yaitu dengan adanya sentra industri bata merah di Lingkungan Gambirejo Kelurahan Warujayeng dan industri menengah lainnya di Desa Sambirejo.
f. Kawasan perdagangan kecil dan menengah di sepanjang jalur Barong – Warujayeng dan Warujayeng/Tanjunganom sampai dengan perbatasan Kecamatan Prambon.

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Tanjunganom menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah

Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Tanjunganommerupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Tanjunganom yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Tanjunganom menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Tanjunganom dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Tanjunganom dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Tanjunganom mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu, agar tujuan strategi dapat ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun **Tujuan Strategi** Pemerintah Kecamatan Tanjunganom adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.*

Sedangkan untuk tujuan strategi yang dimaksud, maka sasaran-sasaran yang diharapkan antara lain :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survey kepuasan masyarakat.

b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
   Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
   Indikator : Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yangbaik.

Adapun uraian diatas dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjunganom 2019-2023

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	2475	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,09	83,3	83,5	83,6	83,7	83,8	83,8
					Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	91,75	92,25	92,75	93,25	93,75	94,50	94,50
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Tanjunganomdalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2.Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Tanjunganom, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :(Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi : 2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	• Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	• Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	• Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
		• Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
		• Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tanjunganomselama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tanjunganom. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjunganomakan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Peningkatan Kinerja Kelurahan
8. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	1 01 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***	80	80	76.429.000	82	126.800.000	84	128.768.000	86	150.000.000	88	154.400.000	88	706.200.000	*Kec TANJUNGANOM*	*TANJUNGANOM*
			1 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	12 bln	12 bln	-	12 bln	1.800.000	12 bln	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bln	2.400.000	12 bln	10.200.000		
			1 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	12 bln	12 bln	14.868.000	12 bln	16.868.000	12 bln	17.868.000	12 bln	20.000.000	12 bln	22.000.000	12 bln	131.000.000		
			1 01 01 03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	12 bln	12 bln	6.851.000	12 bln	8.000.000	12 bln	9.500.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	51.700.000		
			1 01 01 04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	1.500.000	12 bln	3.500.000	12 bln	4.500.000	12 bln	5.000.000	12 bln	6.500.000	12 bln	35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia					2.500.000	12 bln	3.500.000	12 bln	4.500.000	12 bln	5.000.000	12 bln	23.000.000		
			1	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia					2.500.000	12 bln	3.000.000	12 bln	4.500.000	12 bln	4.500.000	12 bln	17.000.000		
			1	01	01	07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	12 bln	12 bln	14.210.000	12 bln	16.500.000	12 bln	25.000.000	12 bln	20.500.000	12 bln	22.500.000	12 bln	138.000.000		
			1	01	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bln	12 bln	15.000,000	12 bln	22.500,000	12 bln	24.000,000	12 bln	24.000,000	12 bln	24.000,000	12 bln	109.500,000		
			1	01	01	09	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	12 bln	12 bln	24.000.000	12 bln	24.000.000	12 bln	20.000.000	12 bln	26.000.000	12 bln	28.000.000	12 bln	128.000.000		
			1	01	01	10	Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bln	12 bln	-	12 bln	3.000.000	12 bln	4.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	5.000.000	12 bln	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang ter arsip dengan baik	0			5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000			
			1	01	01	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	1 jenis	-	0	0	1 jenis	5.000.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	5.000.000		
			1	***01***	***02***		***Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Prosentase sarana/prasarana layak fungsi***	80%	80%	80.976.200	80%	130.000.000	80%	179.000.000	80%	155.500.000	80%	374.000.000	80%	374.000.000	Kec TANJUNGANOM	TANJUNGANOM
			1	01	02	01	Pengadagaan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	200,000.000	1 unit	200,000.000		
			1	01	02	02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	4 jenis	7 unit	4.500.000	6 unit	26.000.000	7 unit	30.000.000	7 unit	30.000.000	7 unit	33.000.000	7 unit	33.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	02	03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	2 Jenis	5 unit	6.500.000	6 Unit	22.000.000	6 unit	30.000.000	6 unit	35.000.000	6 unit	35.000.000	6 unit	35.000.000		
			1	01	02	04	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	1 Jenis	30	7.000.000	1 set	5.000.000	3 set	10.000.000	2 set	11.000.000	2 set	12.000.000	1 set	12.000.000		
			1	01	02	05	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	32.745,200	3 unit	36.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	44.000.000	3 unit	44.000.000		
			1	01	02	06	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 kendraan	3 kendraan	19.000.000	3 kendraan	28.000.000	3 kendraan	45.000.000	3 kendraan	30.000.000	3 kendraan	32.000.000	3 kendaraan dinas	32.000.000		
			1	01	02	07	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	6.551.000	4 jenis	5.000.000	4 jenis	10.000.000	4 jenis	6.000.000	4 jenis	7.000.000	4 jenis	7.000.000		
			1	01	02	08	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	4.680.000	3 jenis	4.000.000	3 jenis	10.000000	3 jenis	5.000000	3 jenis	5.000000	3 jenis	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	02	09	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	Jumlah mebeler yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	4.000.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	4.500000	2 jenis	6.000000	2 jenis	6.000.000		
			1	01	02	10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	200.000.000	0	0	0	0		
			1	***01***	***03***		***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***	***Tingkat kehadiran ASN***	***100 %***	***100 %***	***0***	***100%***	***10.200.000***	***100%***	***21.600.000***	***100%***	***11.400.000***	***100%***	***11.400.000***	***100%***	***7.800.000***		
			1	01	03	01	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0	0	0	22 orang	5.500000	22 orang	7.000.000	22 orang	9.000.000	25 orang	10.000.000	25 orang	10.000.000		
			1	01	03	02	Penyediaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian yang terpenuhi	0	0	0	22 orang	3.500000	22 orang	5.000.000	22 orang	5.000.000	22 orang	5.000.000	22 orang	5.000.000		
			1	01	03	03	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah instruktur senam yang mendapat honor	4 orang	0	0	4 org	1.200000	4 org	9.600.000	4 org	9.600.000	4 org	9.600.000	4 org	9.600.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	05		***Program Peningkatan Kapasitas Aparatur***	***Persentase Pegawai dengan kategori nilai SKP 'Baik"***	***100 %***	***100 %***		***100%***	***15.000.000***	***100%***	***15.000.000***	***100%***	***15.000.000***	***100%***	***15.000.000***	***100%***	***15.000.000***	***Kec TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	05	01	Peningkatan wawasan Aparatur Kecamatan	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	22 org	22 org		22 org	15.000.000	22 org	15.000.000	22 org	15.000.000	22 org	15.000.000	22 org	15.000.000		
			1	***01***	***04***		***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun***	***6 Dok***	***6 Dok***	***3.500.000***	***6 dok***	***6.000.000***	***6 Dok***	***6.000.000***	***6 Dok***	***6.000.000***	***6 Dok***	***6.000.000***	***6 Dok***	***6.000.000***	***Kec TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	04	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	04	03	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000		
			1	01	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	3.000.000		
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraa	1	01	06		***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan***	***Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat***	***40 Koordinasi***	***45 Koordinasi***	***309.500.000***	***45 Koordinasi***	***309.500.000***	***45 Koordinasi***	***325.000.000***	***45 Koordinasi***	***331.000.000***	***45 Koordinasi***	***363.000.000***	***45 Koordinasi***	***363.000.000***	***Kec. TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	06	01	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Data profil /Monografi yang tersusun, Laporan Bidang pemerintahan yang tersusun, Jumlah Publikasi Kegiatan Kecamatan	3 jenis	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	30.000.000	3 Jenis	30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		n masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	1	01	06	02	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	4 Keg	5 Keg	25.000.000	5 Keg	25.000.000	5 Keg	35.000.000	5 Keg	35.000.000	5 Keg	35.000.000	5 Keg	35.000.000		
			1	01	06	03	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	2 Keg	4 Keg	24.000.000	4 Keg	24.000.000	4 Keg	30.000.000	4 Keg	35.000.000	4 Keg	35.000.000	4 Keg	35.000.000		
			1	01	06	04	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	4 Keg	5 Keg	10.000.000	5 Keg	10.000.000	5 Keg	10.000.000	5 Keg	10.000.000	5 Keg	15.000.000	5 Keg	15.000.000		
			1	01	06	05	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	4 keg	5 Keg	66.000.000	5 Keg	66.000.000	5 Keg	66.000.000	5 Keg	66.000.000	5 Keg	70.000.000	5 Keg	70.000.000		
			1	01	06	06	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumla program PKK yang terfasilitasi	10 program	10 program	12.000.000	10 program	19.000.000	10 program	25.000.000	10 program	25.000.000	10 program	28.000.000	10 program	28.000.000		
			1	01	06	07	Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 Keg	3 Keg	30.000.000	3 Keg	30.000.000	3 Keg	50.000.000	3 Keg	50.000.000	3 Keg	55.000.000	3 Keg	55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	06	08	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa/kelurahan lunas PBB P2 tepat waktu	16 desa/kel	16 desa/kel	43.000.000	16 desa/kel	43.000.000	16 desa/kel	60.000.000	16desa	60.000.000	16 desa/kel	65.000.000	16 desa/kel	65.000.000		
							Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang melakukan tata kelola yang baik	*1*	*01*	*07*		***Program Pembinaan Desa/Kelurahan***	***Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa***	***75%***	***85%***	***65.000.000***	***90%***	***67.500.000***	***100%***	***70.000.000***	***100%***	***75.000.000***	***100%***	***75.000.000***	***100%***	***75000.000***	***Kcc. TANJUNGANOM***	***TANJUNGANOM***
			1	01	07	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	25.000.000	16 desa/kelurahan	25.000.000	16 desa/kelurahan	25.000.000	16 desa/kelurahan	25.000.000	16 desa/kelurahan	25.000.000	16 desa/kelurahan	25.000.000		
								-Tertib administrasi	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan			
								-Menyusun APB Desa	16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan		16 desa/kelurahan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								-Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
								-Menyusun PKT, LPT	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
			1	01	07	02	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan	20.000.000	16 desa/k elurahan	30.000.000	16 desa/k elurahan	30.000.000	16 desa/k elurahan	30.000.000	16 desa/k elurahan	30.000.000		
								-Melaksanakan Musrenbang	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
								-Menyusun profil desa/kelurahan	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
								-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
								-Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT	16 desa/ kelurahan	1616 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
			1	0 1	0 7	0 3	Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan	10.000.000	16 desa/k elurahan	15.000.000	16 desa/k elurahan	15.000.000	16 desa/k elurahan	15.000.000	16 desa/k elurahan	15.000.000				
								-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
								- Membentuk Desa tangguh bencana	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
								-Melaksanakan pembinaan Linmas	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
			1	0 1	0 7	0 4	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan	10.000.000	16 desa/k elurahan	12.500.000	16 desa/k elurahan	20.000.000	16 desa/k elurahan	20.000.000	16 desa/k elurahan	20.000.000	16 desa/k elurahan	20.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
								-Meningkat swadaya/partisipasi/gotong royong masyarakat	16 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan		16 desa/k elurahan			
							Peningkatan Kinerja Kelurahan Tanjunganom																
							Penyediaan Operasional Perkantoran					12 bulan	378.754.700	12 bulan	380.000.000	12 bulan	380.000.000	12 bulan	395.000.000	12 bulan	395.000.000		
							Penyelenggaraan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan	50.800.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000		
							Pemberdayaan masyarakat kelurahan					12 bulan	33.441.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan					12 bulan	319.500.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	335.000.000	12 bulan	335.000.000		
							Peningkatan Kinerja Kelurahan Warujayeng																
							Penyediaan Operasional Perkantoran					12 bulan	578.660.500	12 bulan	585.000.000	12 bulan	585.000.000	12 bulan	590.000.000	12 bulan	590.000.000		
							Penyelenggaraan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000		
							Pemberdayaan masyarakat kelurahan					12 bulan	246.250.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	255.000.000	12 bulan	255.000.000		
							Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan					12 bulan	195.154.136	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	205.000.000	12 bulan	205.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja dari dokumen ini terdiri dari2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Dan adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Tanjunganom adalah *"Nilai Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan"*

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjunganom

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasikan kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek kesejahteraan 2. Aspek pemberdayaan 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Tramtib 8. Aspek Pemerintahan	N/A	2380	2420	2450	2480	2500	2500

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Tanjunganomsebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tanjunganom

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83 %	83 %	84 %	85 %	86 %	88 %	88 %
2	Prosentase Sarana / prasarana yang layak fungsi	$\frac{\sum \ Prasarana\ layak\ fungsi}{\sum \ Sarana\ dan\ Prasarana} x100\ \%$	90 %	93 %	95 %	95 %	96 %	97 %	97 %
3.	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum \ kehadiran\ ASN}{\sum \ ASN} \times 100$	94	95	95	96	96	97	97
4.	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \ Lap.kinerja\&lap.keuangan\ yg\ tepat\ waktu}{\sum \ Seluruh\ laporan\ kinerja\ dan\ keuangan\ yg\ disusun} x100\ \%$	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase ASN dengan kategori nilai SKP “Baik”	$\frac{\sum \ ASN\ dgn\ nilai\ SKP\ "Baik"}{\sum \ ASN} x100\ \%$	100	100	100	100	100	100	100
6.	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	$\frac{\sum \ Koordinasi\ yg\ ditindak\ lanjuti}{\sum \ Jml.Seluruh\ koordinasi} x100\ \%$	88	90	92	93	94	95	95
7.	Tingkat efektifitas Pembinaan Desa/kelurahan	$\frac{\sum \ Pembinaan\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum \ Seluruh\ pembinaan} x100\ \%$	90	92	93	94	96	96	96

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjunganom2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Tanjunganom dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang–undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.